

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Penelitian

#### Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian

No.	Pertanyaan	Informan
<b>Prinsip Akuntabilitas &amp; Transparansi</b>		
<b>Tahap Perencanaan</b>		
1.	Bagaimana proses perencanaan dalam pengelolaan dana APBDes, apakah telah dapat dikatakan baik apabila ditinjau berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 ?	H. Husnul Khuluq, S.E sebagai Kepala Desa
2.	Apakah anda berkenan menunjukkan bukti ? Berupa dokumen, atau surat-surat yang menyatakan bahwa pengelolaan APBDes tersebut sudah dapat dikatakan baik.	H. Husnul Khuluq, S.E sebagai Kepala Desa
3.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan penyusunan APBDes ?	H. Husnul Khuluq, S.E sebagai Kepala Desa
4.	Apa yang perlu dipertimbangkan dalam proses penyusunan anggaran APBDes ?	H. Husnul Khuluq, S.E sebagai Kepala Desa
<b>Tahap Pelaksanaan</b>		
1.	Bagaimana mekanisme tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Kesamben Wetan dalam proses mengelola dana APBDes ?	M. Qodim sebagai Sekretaris Desa
2.	Pada tahap ini, siapa yang bertugas sebagai penanggung jawab ?	M. Qodim sebagai Sekretaris Desa
3.	Bagaimana cara pemerintah desa mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan dana APBDes ?	M. Qodim sebagai Sekretaris Desa
4.	Apakah terdapat kendala yang signifikan pada tahap pelaksanaan pengelolaan APBDes ?	M. Qodim sebagai Sekretaris Desa

5.	Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam menetapkan rincian kegiatan beserta anggaran dalam APBDes ?	M. Qodim sebagai Sekretaris Desa
<b>Tahap Penatausahaan</b>		
1.	Bagaimana pelaksanaan penatausahaan pada proses pengelolaan APBDes ?	Evi Susianti sebagai Bendahara Desa
2.	Adakah struktur mekanismenya ?	Evi Susianti sebagai Bendahara Desa
3.	Siapa saja yang terlibat dalam proses penatausahaan ?	Evi Susianti sebagai Bendahara Desa
4.	Apakah terdapat kendala yang signifikan pada proses penatausahaan terkait pengelolaan dana APBDes ?	Evi Susianti sebagai Bendahara Desa
<b>Tahap Pelaporan &amp; Pertanggungjawaban</b>		
1.	Bagaimana proses pelaporan atas implementasi pengelolaan APBDes ?	H. Husnul Khuluq, S.E sebagai Kepala Desa
2.	Kapan jangka waktu untuk melakukan pelaporan ?	H. Husnul Khuluq, S.E sebagai Kepala Desa
3.	Bagaimana tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban atas implementasi pengelolaan APBDes ?	M. Qodim sebagai Sekretaris Desa
4.	Apakah disetiap periode anggaran perlu disertai lembar pertanggungjawaban ?	M. Qodim sebagai Sekretaris Desa
5.	Apakah dalam setiap periode kerja sebagai Bendahara Desa diperlukan dokumen pertanggungjawaban atas kinerja ?	Evi Susianti sebagai Bendahara Desa

## Lampiran 2 : Hasil Wawancara Penelitian

### Lampiran 2. Hasil Wawancara Penelitian

No.	Pertanyaan	Jawaban	Informan
<b>Prinsip Akuntabilitas &amp; Transparansi</b>			
<b>Tahap Perencanaan</b>			
1.	Menurut bapak selaku kepala desa, proses perencanaan dalam pengelolaan dana APBDes sejauh ini apakah sudah dapat dikatakan baik jika ditinjau berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 ?	Ya, semua sudah sesuai dengan prosedur, dalam menyusun APBDes kita mengadakan rapat kemudian musyawarah desa, kita dari masyarakat mengumpulkan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan di wilayah masing-masing, mana yang jadi kebutuhan mana yang menjadi prioritas, jadi kemudahan, jadi kita tahu mana yang harus didahulukan. Dalam penyusunan APBDes itu perlu kerjasamanya tim dari RT/RW, BPD, dan semua perangkat.	H. Husnul Khuluq, S.E sebagai Kepala Desa
2.	Apakah bapak berkenan menunjukkan bukti ? Berupa dokumen-dokumen, atau surat-surat yang menyatakan bahwa APBDes tersebut sudah dapat dikatakan baik ?	Alhamdulillah, semua sudah saya laksanakan sesuai dengan Permendagri, kita sudah memaparkan juga mulai dari transparan, karena didepan juga ada penggunaan APBD untuk tahun sebelum dan sesudah, tetap kita paparkan di depan. Maka itu, kita selalu transparan untuk penggunaan APBD.	H. Husnul Khuluq S.E sebagai Kepala Desa
3.	Menurut bapak, bagaimana partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan penyusunan APBDes ?	Ya, alhamdulillah masyarakat juga kooperatif juga aktif dalam pembangunan di lingkungan desa. Karena semua itu tidak bisa berjalan	H. Husnul Khuluq, S.E sebagai Kepala Desa

		sendiri tanpa dukungan dari elemen masyarakat, dari RT, RW, BPD, semua itu harus berperan aktif karena tidak bisa bekerja sendiri, dari pemerintah desa juga harus berupaya meningkatkan kebutuhan desa dari yang sebelumnya kurang baik menjadi baik lagi, makanya itu perlu adanya musyawarah desa, kami sudah adakan musyawarah nanti ada usulan, ada gambaran, ada planing, nanti ada eksekusi pelaksanaannya.	
4.	Apa yang perlu dipertimbangkan dalam proses menyusun anggaran APBDes ?	Ya, kita harus menyusun dengan anggaran yang telah diterapkan dari Permendagri dari sini dari APBD Kabupaten, karena di Kesamben ini sudah memasuki desa yang mandiri, maka itu harus benar-benar kuat, harus mandiri, karena harus berperan aktif dari PAD, dari peningkatan aset desa kita harus tingkatkan terus, karena desa tidak berpacu pada penghasilan dari Kabupaten, kita harus mempunyai trobosan, mempunyai pemikiran lebih jauh karena di desa ini sudah mau mandiri, alhamdulillah penggunaan dananya sudah ada plot-plotnya masing-masing, jadi tidak mengandalkan dari	H. Husnul Khuluq, S.E sebagai Kepala Desa

		APBD Kabupaten, seperti itu.	
<b>Tahap Pelaksanaan</b>			
1.	Bagaimana mekanisme tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Kesamben Wetan dalam proses mengelola dana APBDes ?	Dari awal sebelum itu diflorkan, maka kita selaku panitia desa harus mengundang dari RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, terutama BPD karena selaku untuk yaitu memberi keputusan RAPBDES tersebut. Kalau tidak ada kehadiran dari BPD maka APBDes itu belum bisa disahkan karena keputusan itu yaitu yang memutuskan adalah BPD. Pemerintah desa mengajukan pada BPD sehingga RAPBDES itu menjadi APBDes apabila sudah disahkan oleh BPD.	M. Qodim sebagai Sekretaris Desa
2.	Selain tokoh-tokoh yang tadi, mungkin ada tokoh masyarakat yang lain pak ?	Ya itu tadi yang saya sebutkan, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ya termasuk RT/RW, termasuk LPMD, termasuk juga tim penggerak PKK yaitu ketuanya.	M. Qodim sebagai Sekretaris Desa
3.	Kemudian, yang bertugas sebagai penanggung jawabnya siapa pak ?	Penanggung jawab adalah seluruhnya untuk pembuatan sampai persetujuan dari BPD adalah tanggung jawabnya ada namanya panitia tim sembilan, tapi diketuai oleh SekDes. Ketua SekDes wakil ketuanya dari LKMD atau LPMD dan anggotanya dari yaitu tadi, dari perangkat desa yang berwenang, dalam artian untuk wilayahnya.	M. Qodim sebagai Sekretaris Desa

4.	Bagaimana cara pemerintah desa mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan dana APBDes ?	Untuk mewujudkan diantaranya, kita itu harus mempublikasikan dalam arti yaitu untuk banner, nah banner itu sebagai transparansi pemerintahan desa untuk dipublikasikan agar warga masyarakat itu semua tahu tentang APBDes tahun berjalan.	M. Qodim sebagai Sekretaris Desa
5.	Apakah terdapat kendala yang signifikan pada tahap pelaksanaan pengelolaan APBDes ?	Kalau masalah kendala signifikan itu tidak ada. Kendalanya kita dari Kabupaten masalah penurunan apa istilahnya, dana itu belum bisa dipastikan dalam artian pagu indikatifnya. Pagu indikatif itu kan sebenarnya bulan sembilan itu sudah turun, <i>lha</i> kendalanya cuma disitu saja, tapi kan Desember sudah turun, <i>lha</i> padahal Desember itu sebenarnya harus sudah disahkan dari BPD per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Tapi <i>ndak</i> apa-apa, pasalnya seharusnya kan bulan sembilan sudah turun, karena Kabupaten tunggu dari Pusat, karena ini dana APBN kalau APBD <i>ndak</i> masalah, <i>dah</i> itu aja.	M. Qodim sebagai Sekretaris Desa
6.	Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam menetapkan rincian kegiatan beserta anggaran dalam APBDes ?	Penetapan itu, kita sesuai dengan PERBUP yang diturunkan dari Kabupaten, itu kita baru bisa memutuskan, karena pertama yang diputuskan itu dana sebelum	M. Qodim sebagai Sekretaris Desa

		<p>PERBUP itu kan disetujui BPD, habis di BPD kita harus memilah-milah, dari memilah-milah itu PERBUPnya itu dari Kabupaten bagaimana bunyinya disitulah kita menerjemahkan. Dari untuk APBD itu SilPa berapa, pemerintah berapa, untuk pemberdayaan itu berapa, untuk pembinaan itu berapa, untuk pembangunan itu berapa dan untuk biaya tak terduga itu berapa dalam arti seperti adanya Covid-19 kemarin itu kan didanai dari itu. <i>Lha</i> antara PERPRES, PERMENDAGRI, PERMENDES ditunjang dengan PERDA maupun PERBUP nah itu baru bisa mengklarifikasikan nantinya APBDes itu diarahkan kemana. Contoh seperti kemarin, jadi kita itu ada dana namanya dana ya BLT itu harus 40%, ketahanan pangan itu 20%, PPKM itu 8%, sehingga 68% itu kegiatan itu sudah ada pasti pagu indikatifnya dan sudah ada <i>range-range</i>annya untuk itu untuk ini, <i>lha</i> sisanya itu yaitu untuk pembangunan infrastruktur atau yang lainnya atau namanya diperbinaan, pemberdayaan itu bisa dimasukkan, itu masalah dana APBN. Tapi kalau APBD</p>	
--	--	---	--

		<p>yaitu sesuai kita hanya dengan SilTap sudah ya, istilahnya sudah <i>nyukupno lah, istilah e</i> kan sudah <i>ngepas</i>, dalam artian pas itu ya sudah tidak ada, karena apa ? ya sesuai dengan aturan, kita <i>ndak</i> bisa, <i>lah</i> itu kembali lagi nanti kalau kita dimasukkan di SISKEUDES kembali lagi ke aturan pakai PERMENDES/PERMENDAG RI No. 06 Tahun 2014 itu kan 30:70. Kalau 30:70 tidak sesuai maka SISKEUDES itu tidak bisa <i>nge-link</i> atau tidak bisa mau untuk diposting, nah itu kan kendalanya disitu. Tapi saya kira sudah 30% untuk SilTap itu, BKD itu tidak boleh termasuk. Nah itu kan, aturan-aturan selalu regulasi yang dari atas itu kita selalu mengikuti, sehingga apa, tidak terjadi ketimpang-tindihan apabila ada pemeriksaan itu kita sudah jelas aturan-aturan yang kita pakai.</p>	
<b>Tahap Penatausahaan</b>			
1.	Bagaimana pelaksanaan penatausahaan pada proses pengelolaan APBDes menurut ibu selaku bendahara desa ?	Kan ini, penatausahaan disini itu pakai aplikasi SISKEUDES yang dari Kabupaten, semuanya sudah ada jadi tinggal input saja.	Evi Susianti sebagai Bendahara Desa
2.	Berarti sudah tidak pakai pencatatan manual ?	<i>Ndak.</i>	Evi Susianti sebagai Bendahara Desa



3.	Jadi waktu mau pelaporan tinggal langsung input saja, tidak pakai coretan lagi ?	Iya, <i>ndak</i> .	Evi Susianti sebagai Bendahara Desa
4.	Adakah struktur mekanismenya ?	Yang pertama, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) terus pencairan, kemudian langsung SPJ kegiatan.	Evi Susianti sebagai Bendahara Desa
5.	Siapa sajakah yang terlibat dalam proses penatausahaan ini?	Semuanya. Pelaksana kegiatan, terus Kepala Desa, Sekretaris Desa sebagai verifikasi (verifikator), Bendahara sebagai yang mengeluarkan.	Evi Susianti sebagai Bendahara Desa
6.	Apakah terdapat kendala yang signifikan pada proses penatausahaan terkait pengelolaan dana APBDes bu? Mungkin pada waktu penggunaan aplikasi bu ?	Sejauh ini enggak, karena semua sudah tersistem jadi langsung terkoneksi, sekali input kan semuanya langsung keluar. Ya namanya aplikasi kan servernya nggak pasti, kemarin <i>maintenance</i> 3 hari, dari mulai senin sampai kemari, baru sekarang baru bisa. Kendala <i>e</i> kadang internet, ya terkadang kan <i>wifi</i> kadang lemot soal <i>e</i> kan <i>online</i> .	Evi Susianti sebagai Bendahara Desa
<b>Tahap Pelaporan &amp; Pertanggungjawaban</b>			
1.	Bagaimana proses pelaporan atas implementasi pengelolaan APBDes tahun anggaran 2021 ?	Ya, setiap kegiatanapa saja yang di desa semua dari penggunaan dana APBD, dari Jaspas, dari Polkir, semua itu langsung setelah selesai pengerjaan setelah pelaksanaan lalu dilanjutkan dengan laporan pekerjaan/pertanggungjawaban	H. Husnul Khuluq S.E sebagai Kepala Desa

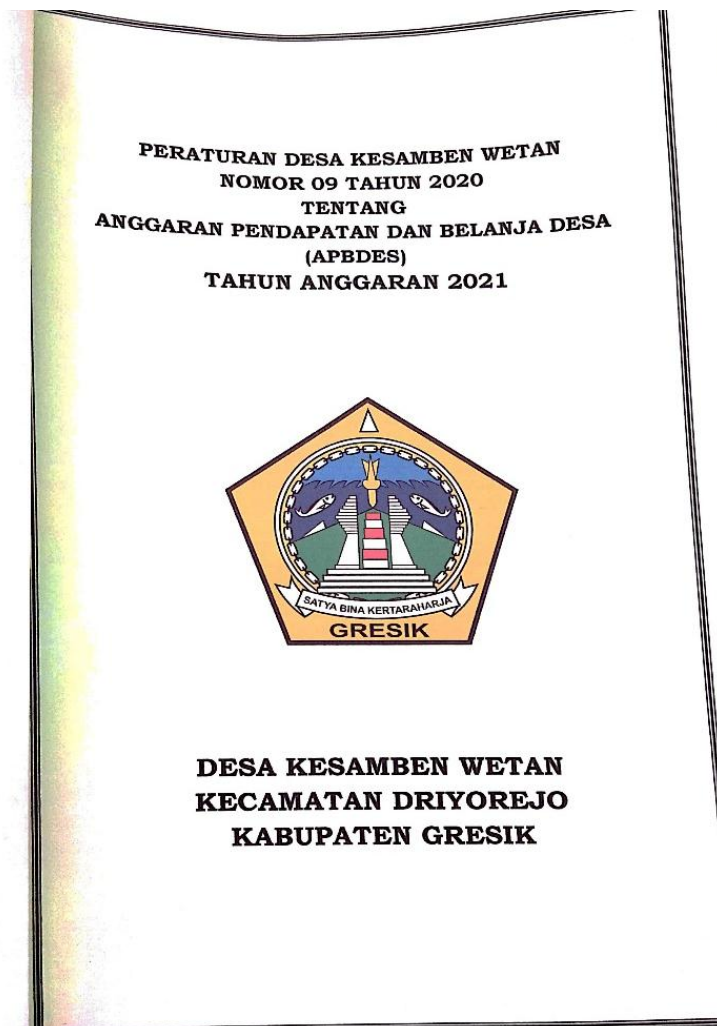
		, jadi semua itu dilengkapi semua, disini itu tertib, tidak mau tidak melaksanakan prosedur. Semua itu sesuai prosedural, kita harus bisa melaporkan, karena kita sudah melaksanakan dari awal sudah mempunyai rancangan penyusunan, setelah itu nanti pelaksanaan, setelah pelaksanaan selesai baru itu laporan. Jadi semua itu lengkap, tidak hanya perencanaan saja.	
2.	Untuk jangka waktu pelaporan biasanya dalam berapa bulan pak ?	Ya, setelah pelaksanaannya selesai, satu bulan sudah selesai	H. Husnul Khuluq S.E sebagai Kepala Desa
3.	Berarti untuk pelaporannya setelah diproses disini, nanti diserahkan ke Kecamatan terlebih dahulu baru ke Kabupaten ?	Iya, pelaporannya ke Kabupaten tembusan ke Kecamatan terus Inspektorat, Kejaksaan semuanya itu. Makanya data dari desa itu nggak semua orang bisa mengakses karena kita bekerja sama dari APBD Kabupaten jadi kita harus mengetahui dan menggunakan itu semua dengan bijak, tidak semua kita itu kita florkan. Karena kita sudah memaparkan di pamflet di Balai Desa, sudah transparan semua.	H. Husnul Khuluq S.E sebagai Kepala Desa
4.	Bagaimana tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban atas implementasi pengelolaan APBDes	Untuk pengelolaan itu apabila dana itu sudah masuk ke rekening, dana itu kan sudah namanya kita plot untuk apa aja. Nah kita plot itu kita ambil	M. Qodim sebagai Sekretaris Desa

	tahun anggaran 2021 ?	sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, nah kalau sudah itu sesuai dengan kebutuhan di lapangan, kita ada namanya SPP (Surat Permintaan Pencairan) kepada yaitu Kepala Desa, dari Bendahara minta Kepala Desa, baru mengambil. Nah mengambil ini nanti namanya ada TPK (Tim Pelaksana Kegiatan)/tim pengelolaan dana, dari pengerjaan itu disampaikan bahwa ini <i>lho</i> kegiatan ini tolong dikerjakan.	
5.	Kalau pertanggungjawabannya pak ?	Pertanggungjawaban apabila itu sudah selesai, dalam arti satu bangunan itu sudah selesai, maka kita harus melaporkan namanya yaitu pertanggungjawaban, baik itu ya istilah <i>e</i> kan nota, kwitansi, dan ditandatangani oleh TPK, oleh SEKDES, oleh Bendahara, bahwa dana tersebut sudah keluar sesuai dengan <i>budget</i> yang ada dilapangan yang dikerjakan. Karena itu nanti tidak menutup kemungkinan sekarang itu namanya ada PPn, PPh itu sudah termasuk dipotong PPn, PPh. <i>Lha</i> mulai april kemarin, Ppnnya dulu kan 10, sekarang 11% ditambah PPh itu 1,5%, berarti 12,5%. Jadi PPh itu apabila kita belanja lebih dari Rp. 2jt, baru itu kena PPh.	M. Qodim sebagai Sekretaris Desa

		Kalau dibawah Rp. 2jt, maka kita akan bayar PPh 1,5%.	
6.	Apakah disetiap periode anggaran perlu disertai lembar pertanggungjawaban ? Dan apakah hal tersebut berlaku juga bagi masa jabatan bapak ?	Setiap ada kegiatan, kita tidak mau apabila sudah <i>diprint</i> namanya STPJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) yaitu berupa faktor pendukung dalam artian nota maupun kwitansi, kita itu harus <i>cross check</i> , kalau sudah ada berarti kita sudah disahkan dalam artian oh ya ini benar, ini sudah lengkap, kalau belum lengkap dari data tersebut karena ada TPK (Tim Pengelolaan Keuangan) yang dilapangan saya suruh lengkapi semua biar kita bisa tandatangan dan akan dilaporkan.	M. Qodim sebagai Sekretaris Desa
7.	Oh iya pak, yang pelaporan tadi biasanya dilaporkan dalam berapa bulan pak, setelah implementasi ?	Bukan hanya berapa bulan. Kita kalau selesai pekerjaan langsung laporan. Karena kita sistem kerjanya SISKEUDESnya sekarang itu secara <i>online</i> , kita <i>ndak</i> akan berani. Karena kita mengambil uang, sana sudah tahu. Misal mengambil hari ini, kita namanya ada estimasi yaitu waktunya berapa minggu, berapa hari, atau berapa bulan, jadi namanya HOK (Hari Orang Kerja) itu sudah jelas, oh ya sudah selesai sekian dua minggu. Habis dua minggu selesai nota sudah ngumpul baru kita laporkan.	M. Qodim sebagai Sekretaris Desa

8.	Apakah dalam setiap periode kerja sebagai Bendahara Desa diperlukan dokumen pertanggungjawaban atas kinerja ibu ?	Iya pasti.	Evi Susianti sebagai Bendahara Desa
9.	Bentuk dokumennya bagaimana bu ?	Ya langsung laporan realisasi penggunaan anggaran biasanya, terus kan juga ada buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, dsb.	Evi Susianti sebagai Bendahara Desa

**Lampiran 3 : Daftar Data Hasil Observasi**



Data 1. PERDES Tentang APBDES Desa Kesamben Wetan

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA KESAMBEN WETAN  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KESAMBEN WETAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

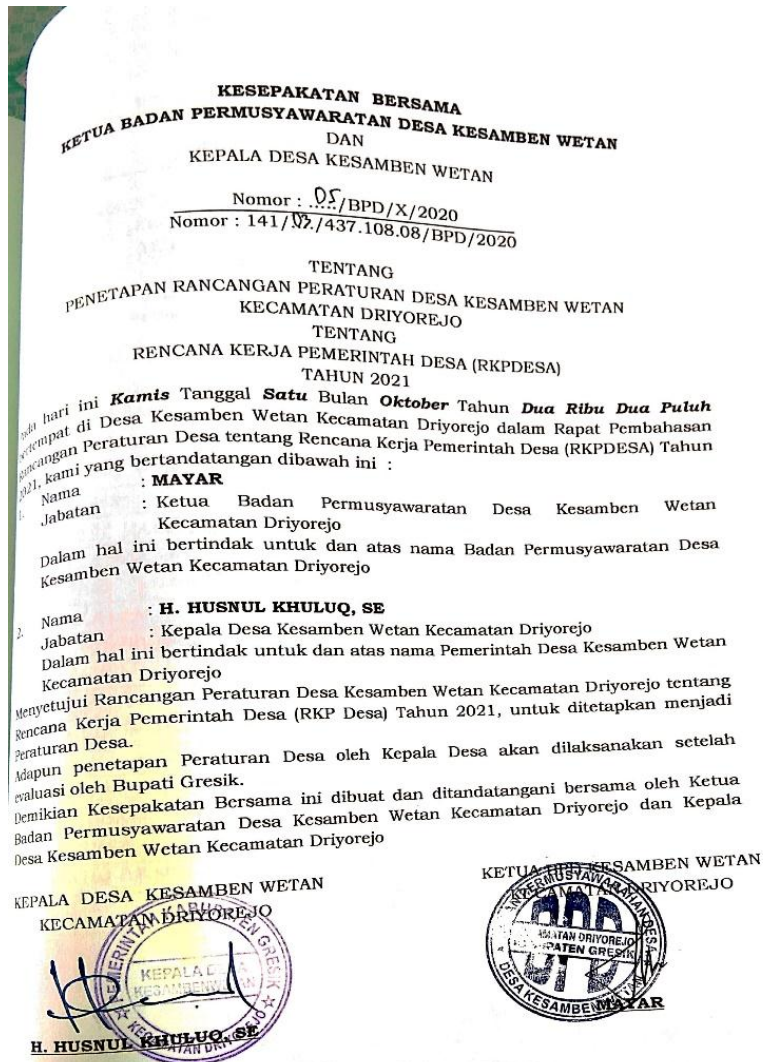
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	248.550.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.820.975.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	51.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.120.525.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	661.219.680,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	344.893.311,37	
5.3.	Belanja Modal	1.012.322.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	227.250.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.245.684.991,37</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(125.159.991,37)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	125.159.991,37	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	125.159.991,37	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>125.159.991,37</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Desa Kesamben Wetan, 31 December 2020

Kepala Desa Kesamben Wetan



Data 2. APBDES



Data 3. Lembar Kesepakatan Kepala Desa Bersama BPD Atas Penetapan RKPDES



**PERATURAN KEPALA DESA KESAMBEN WETAN  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA KESAMBEN WETAN  
KECAMATAN DRIYOREJO  
KABUPATEN GRESIK**

Data 4. PERDES Tentang Penjabaran APBDes

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KESAMBEN WETAN TAHUN ANGGARAN 2021

## Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	248.550.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.820.975.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	51.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>2.120.525.000,00</u>
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	870.557.991,37
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	931.877.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	26.500.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	189.500.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	227.250.000,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>2.245.684.991,37</u>
Surplus/Defisit	Rp	<u>(125.159.991,37)</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	125.159.991,37
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>125.159.991,37</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Data 5. Penjabaran APBDes



Data 6. PERDES Tentang RPJMDES Tahun 2020-2025

**BUKU KAS UMUM  
PEMERINTAH DESA KESAMPEN WETAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KECAMATAN : KECAMATAN DRYOREJO  
KABUPATEN : KABUPATEN GRESIK  
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Revisi Subsaling	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Buku	Saldo Transakal (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2022		Saldo SaldoAwal					
			Saldo Perkiraan	5.588.166,52	0,00		5.588.166,52	5.588.166,52
2	24/02/2022		DANA DESA (DD) TAHAP I (50%)					
		4.2.L.L01.	Dana Desa	341.607.600,00	0,00	0001/78/15.2008/2022	341.607.600,00	347.195.766,52
3	10/03/2022		ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP I (50%)					
		4.2.L.L01.	Alokasi Dana Desa	214.375.566,00	0,00	0002/78/15.2008/2022	214.375.566,00	561.571.332,52
4	11/03/2022		Pembelian U-ditch dan C3-ditch					
		7.1.L.L01.	Persediaan PPK PPK PPK	3.900.400,00	0,00	0002/89/15.2008/2022	3.900.400,00	565.471.732,52
		7.1.L.L01.	Persediaan PPK PPK PPK 22	507.000,00	0,00		507.000,00	566.148.732,52
5	11/03/2022		Pembelian U-ditch					
		7.1.L.L01.	Persediaan PPK PPK PPK	890.200,00	0,00	0003/89/15.2008/2022	890.200,00	567.038.932,52
		7.1.L.L01.	Persediaan PPK PPK PPK 22	120.800,00	0,00		120.800,00	567.159.732,52
6	11/03/2022		Pembelian Sirsa Ayak dan pasir ungu					
		7.1.L.L01.	Persediaan PPK PPK PPK	400.000,00	0,00	0004/89/15.2008/2022	400.000,00	567.559.732,52
		7.1.L.L01.	Persediaan PPK PPK PPK 22	61.304,00	0,00		61.304,00	567.621.036,52
7	11/03/2022		Pembelian Lany dan Barik (Dana Desa Tahap I)					
			Kas @ Bungkawa	126.000.000,00	126.000.000,00			567.621.036,52
8	11/03/2022		PANJARI KESGAT AN PEMBANGUNAN U-DITCH RT 002 RW 001					
			Kas @ Bungkawa	0,00	66.000.000,00	0001/59/15.2008/2022	66.000.000,00	501.621.036,52
9	11/03/2022		PANJARI KESGAT AN PEMBANGUNAN DRAINASE RT 002 RW 001					
			Kas @ Bungkawa	0,00	19.000.000,00	0002/59/15.2008/2022	19.000.000,00	482.621.036,52
10	11/03/2022		PANJARI RUMAH LITASI RW 002 RT 002 RW 001					
			Kas @ Bungkawa	0,00	41.000.000,00	0003/59/15.2008/2022	41.000.000,00	441.621.036,52

Time: 01/01/2022 8:54:22 AM


Halaman 1

Data 7. Buku Kas Umum (BKU)



Data 8. Baliho/Banner APBDes

## Lampiran 4 : Lain-Lain



**YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)  
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)  
 PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN (S1)  
 PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN (S2)  
 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI (S3)

Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp (031) 5931800 Ext 140 , 141, E-mail: [feb@untag-sby.ac.id](mailto:feb@untag-sby.ac.id)

TERAKREDITASI  
 TERAKREDITASI  
 TERAKREDITASI  
 TERAKREDITASI

Nomor : 1405/K/FEB/IV/2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Permohonan Ijin Untuk  
 Mengadakan Penelitian**

Kepada : Yth. Kepala Desa Kesamben Wetan  
 Desa Kesamben Wetan, Kec. Driyorejo Kab. Gresik



Dengan hormat,  
 Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata 1, maka mahasiswa diwajibkan untuk menyusun dan mempertahankan skripsi sebagai hasil penerapan pelajaran teori serta praktek yang diperoleh berdasarkan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami mohon perkenan Bapak / Ibu untuk memberikan ijin kepada mahasiswa :

Nama : MAKRIFATUL MAULIDIA  
 N. P. M : 1221800027  
 Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi  
 Alamat : Ds. Kesamben Kecamatan Driyorejo Gresik  
 Telp/HP. 08973941875

Guna melakukan penelitian pada :  
 "PEMERINTAH DESA KESAMBEN WETAN KECAMATAN DRIYOREJO "  
 untuk memperoleh data sesuai dengan Skripsi yang sedang disusunnya dengan judul  
 "ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPORTASI ATAS PENGELOLAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DITINJAU DARI  
 PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 (STUDI PADA  
 PEMERINTAH DESA KESAMBEN WETAN KECAMATAN DRIYOREJO) "

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 18 April 2022

  
  
**Dr. H. Slamet Rivadi, M.Si., Ak. CA**  
 NPP. 20220.93.0319

Data 9. Surat Ijin Mengadakan Penelitian Skripsi


**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**KECAMATAN DRIYOREJO**  
**DESA KESAMBEN WETAN**  
 KESAMBEN WETAN – KODE POS 61177  
 Telp. (031) 7509054

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 145 / 161 / 437.108. 8 / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. HUSNUL KHULUQ, SE**  
 Jabatan : Kepala Desa Kesamben Wetan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MAKRIFATUL MAULIDIA**  
 NPM : 1221800027  
 Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi  
 Alamat : Ds Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kab. Gresik  
 No Hp 08973941875

Bahwa Mahasiswa bersangkutan diatas benar-benar telah Melakukan Penelitian diDesa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik dengan Tema “ Analisis Akuntabilitas dan Transparansi atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa ( APBDes ) Ditinjau dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomer 20 Tahun 2018 di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik” dan telah Melaksanakan dengan baik dan sesuai Aturan yang ada didesa Kesamben Wetan.

Demikian Surat Keterangan Balasan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kesamben Wetan, 26 April 2022

**KEPALA DESA KESAMBEN WETAN**  
  
  
**H. HUSNUL KHULUQ, SE**

Data 10. Surat Keterangan Balasan Perijinan Penelitian Skripsi

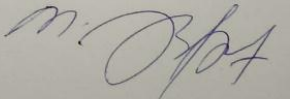
**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : Makrifatul Maulidia  
NBI : 1221800027  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi  
Atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa (APBDes) Ditinjau Dari Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018  
(Studi Pada Pemerintah Desa Kesamben Wetan  
Kecamatan Driyorejo)

Surabaya, 11 Juni 2022

Mengetahui / Menyetujui

Pembimbing,



**Maulidah Narastri, SE., MA**


Data 11. Lembar Pengesahan Skripsi



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp (031) 5925289, E-mail: [fe@untag-sb.ac.id](mailto:fe@untag-sb.ac.id)

**SEMESTER**  
Gasa/ Genap  
2021, 2022

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**



**Nama Mahasiswa / NBI :** Maknafah Maulidia Hzz / 1221800027

**Nama Pembimbing :** Maulidah Narastri, SE, MA

**Judul Skripsi :** Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 (Studi pada pemerintah Desa Keramben Wetan Kecamatan Prigreggo)

**Mulai Program Skripsi : Semester** ..... **Thn. Ak.** ..... **Selesai Bimbingan Tanggal** .....

No.	HARI / TANGGAL	KONSENTRASI		PARAF
		BAB / HAL	KETERANGAN REVISI	
1	23-03-2022	Judul	Revisi tatanan kata	Jst
		Bab 1	Revisi Sub bab	
2.	29-03-2022	Bab 1 & 2	Revisi Bab 2, ACC Bab 1 Persiapkan Bab 3	Jst
3	31-03-2022	Bab 2 & 3	Bab 2 Acc ; Bab 3 Revisi-Subbab	
4	04-04-2022	Bab 3	Bab 3 ACC -Persiapkan daftar wawancara -Persiapkan keputian sidang proposal	Jst
5	20-05-2022	Bab 4	Revisi Substansi; Persiapkan pembahasan	
6	24-05-2022	Bab 4	Revisi Substansi + Collect data	Jst
7	07-06-2022	Bab 4-5	Revisi hasil pembahasan + persiapkan bab	Jst
8	08-06-2022	Bab 4-5	Revisi Bab dan Sub-bab	Jst
9	05-06-2022	Bab 4-5	Revisi akhir Substansi	Jst
10	11-06-2022	Bab 1-5	ACC	Jst

Perpanjangan I \_\_\_\_\_

Semester : \_\_\_\_\_

Th. Ak. : \_\_\_\_\_

Paraf Kajur : \_\_\_\_\_

Surabaya, 04 April 2022

*m. Jst*  
**MAULIDAH NARASTRI, SE, MA**  
 ( Nama dan tanda tangan Pembimbing )

Data 12. Kartu Bimbingan Skripsi

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS  
 PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 (APBDes) DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
 NOMOR 20 TAHUN 2018

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<b>7%</b>
<b>2</b>	Submitted to Politeknik Negeri Jember Student Paper	<b>2%</b>
<b>3</b>	<a href="http://ojs.uho.ac.id">ojs.uho.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	Submitted to iGroup Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	<a href="http://moraref.kemenag.go.id">moraref.kemenag.go.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<a href="http://repository.uhn.ac.id">repository.uhn.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<a href="http://download.garuda.ristekdikti.go.id">download.garuda.ristekdikti.go.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<a href="http://ecampus.imds.ac.id">ecampus.imds.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>

Data 13. Hasil Cek Turnitin